



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3471>

INVESTASI GENERASI MUDA DALAM SURAT BERHARGA NEGARA RITEL SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA

Muhammad Agus Muljanto

Jurusan Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur

magusmuljanto@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 15 January 2022

Revised date: 23 March 2022

Accepted date: 22 April 2022

ABSTRACT

State defense is the right and obligation of every citizen to be carried out both physically and non-physically. The development of various government infrastructure is inseparable from financing constraints in the APBN in the form of a financial gap that can be overcome, among others, by foreign loans which have the consequence of increasing the burden on the APBN every year if there is a depreciation of the Indonesian currency against the foreign currency used. In addition, the choice of strategy through portfolio investment by foreign investors through the purchase of SBN carries a risk that massive selling of SBN in the secondary market can lower the price of SBN and have an impact on the credibility of the government. As an alternative solution, it is necessary to intensify the deepening and inclusion of the domestic financial market as a manifestation of defending the country, especially the contribution of the younger generation in national development through the purchase of retail SBN. However, the challenge faced is the low level of public financial literacy to increase the domestic investor base in retail SBN ownership. The method in this research is to conduct an assessment of the concepts and theories used based on the availability of literature from scientific journal articles, books, and regulations. The results of the analysis show retail investors as the targeted target considering the proportion of the younger generation population is increasing and the character of Indonesian retail investors is generally buy and hold, which is different from the behavior of foreign investors who tend to be profit oriented. Ownership of retail state securities in addition to obtaining a fixed return in the form of a coupon that remains until maturity also has pride as an embodiment of defending the country and love for the homeland has invested in national development. Increasing the younger generation in retail SBN ownership means strengthening the domestic investor base and strengthening the resilience of the nation's and state's economy.

Keywords: National Defense, Young Generation, Retail SBN

ABSTRAKSI

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk dilakukan baik secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan berbagai infrastruktur pemerintah tidak terlepas dari kendala pembiayaan dalam APBN berupa *financial gap* yang dapat ditanggulangi antara lain dengan pinjaman luar negeri yang memiliki konsekuensi menambah beban APBN setiap tahunnya bilamana terjadi depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing yang dipergunakan. Disamping itu pilihan strategi melalui investasi portofolio oleh pemodal asing melalui pembelian SBN memiliki risiko dimana penjualan SBN secara masif di pasar sekunder dapat menurunkan harga SBN dan berdampak terhadap kredibilitas pemerintah. Sebagai alternatif solusi perlu diaktifkan pendalaman dan inklusi pasar keuangan domestik sebagai perwujudan bela negara khususnya kontribusi generasi muda dalam pembangunan nasional melalui pembelian SBN ritel. Namun tantangan yang dihadapi yaitu literasi keuangan masyarakat yang masih rendah untuk meningkatkan basis investor domestik dalam kepemilikan SBN ritel. Metode dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan pada ketersediaan literatur baik dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan peraturan. Hasil analisis menunjukkan investor ritel sebagai target yang dibidik mengingat populasi generasi muda semakin bertambah proporsinya dan karakter investor ritel Indonesia umumnya *buy and hold*, yang berbeda dari perilaku investor asing yang cenderung *profit oriented*. Kepemilikan surat berharga negara ritel disamping memperoleh pengembalian tetap berupa kupon yang tetap sampai jatuh tempo juga memiliki kebanggaan sebagai perwujudan bela negara dan cinta tanah air telah berinvestasi dalam pembangunan nasional. Peningkatan generasi muda dalam kepemilikan SBN ritel berarti turut memperkuat basis investor domestik dan memperkuat ketahanan perekonomian bangsa dan negara.

Kata Kunci : Bela Negara, Generasi Muda, SBN Ritel

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi di era global sangat berpengaruh dalam pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia yang tidak hanya berupa ancaman fisik namun juga ancaman nonfisik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional. Untuk itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara baik secara fisik maupun nonfisik.

Menurut Suryatni (2019) keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain dengan membayar pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan terutama dalam hal ketahanan nasional bidang ekonomi. Sebagai perwujudan warga negara yang berbakti kepada negara hendaknya menyadari pembayaran pajak merupakan kewajiban kepada negara untuk dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan (Maruapey, 2016). Berkenaan dengan program pembangunan pemerintah yang menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian dilaksanakan khususnya melalui ketersediaan infrastruktur antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, bendungan, bandar udara, pelabuhan, jalur kereta api, infrastruktur di bidang listrik, energi, telekomunikasi, dan sebagainya.

Namun pembangunan berbagai infrastruktur dimaksud tidak terlepas dari kendala pembiayaan dalam APBN (*financial gap*), yaitu ketersediaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah belum mencukupi dibandingkan kebutuhan dana dalam penyediaan keseluruhan infrastruktur dimaksud. Beban pembiayaan APBN tersebut tidak cukup ditanggung dari perolehan pendapatan negara sehingga memunculkan defisit APBN. Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003). Hal ini menunjukkan bahwa defisit APBN terjadi ketika anggaran belanja negara melampaui

anggaran pendapatan negara. Selanjutnya untuk keperluan menutup defisit APBN tersebut dalam postur APBN selain keberadaan komponen anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara, terdapat komponen pembiayaan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai defisit APBN.

Sampai dengan triwulan I Tahun 2021 dukungan pembiayaan dari APBN melalui pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur sebesar 59,9 persen yang sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain dengan menitikberatkan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Namun konsekuensi yang timbul dari hutang pemerintah dalam bentuk pinjaman luar negeri dengan menggunakan mata uang asing misal dolar amerika serikat (USD) yaitu menambah beban APBN setiap tahunnya bilamana nilai mata uang rupiah (IDR) terdepresiasi terhadap USD. Hal ini disebabkan untuk membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman pemerintah mengeluarkan lebih banyak rupiah dari yang semula diperhitungkan saat mata uang rupiah belum terdepresiasi.

Untuk menghindari risiko nilai tukar mata uang tersebut maka diperlukan strategi pemerintah dalam upaya memaksimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dengan penggunaan *local currency* atau mata uang rupiah sedangkan pemanfaatan sumber pembiayaan luar negeri (eksternal) sebatas pelengkap saja. Optimalisasi sumber pembiayaan dalam negeri oleh pemerintah ditempuh antara lain melalui penerbitan surat berharga negara. Dalam hal ini pemerintah mendorong dan memberikan peluang serta kesempatan secara langsung kepada masyarakat secara perorangan untuk dapat berinvestasi sekaligus bentuk perwujudan cinta tanah air melalui pembelian surat berharga negara ritel.

Hasil investasi surat berharga negara ritel tersebut dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah nusantara sebagai investasi warga negara untuk merekatkan ikatan kebangsaan mewujudkan ketahanan bangsa dan negara Indonesia yang maju dan mandiri. Kontribusi warga negara dalam

investasi infrastruktur pemerintah sejalan seiring dengan perubahan kedua UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Perubahan kedua UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 3 berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara", sedangkan pasal 30 ayat 1 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Dengan demikian wujud bela negara dalam ketahanan nasional bidang ekonomi selain melalui pembayaran pajak juga dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangsih yang lain berupa investasi masyarakat dalam surat berharga negara ritel. Namun perolehan investasi dari masyarakat yang diharapkan pemerintah tersebut sangat ditentukan seberapa baik literasi keuangan yang dimiliki masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan investasi.

Hasil riset menunjukkan adanya tingkat literasi keuangan yang rendah seperti di negara Indonesia yang menjadi permasalahan serius mengingat literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap inklusi dan perilaku keuangan (Yushita, 2017). Hal ini ditegaskan dalam survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Artina dan Cholid (2018) bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 diperoleh tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah. Demikian pula yang terjadi di daerah, dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Bangkalan Madura yang mayoritas bekerja di sektor informal dengan latar belakang pendidikan yang rendah terkait pengelolaan keuangan (Prayogi dan Haryono, 2017). Bahkan menurut Artina dan Idham Cholid (2018) rendahnya literasi atau pemahaman terhadap produk lembaga keuangan menjadikan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk perbankan atau lembaga keuangan resmi menjadi terbatas yang mengakibatkan sebagian masyarakat terjebak dalam investasi ilegal.

Terkait literasi keuangan bagi generasi muda, menurut hasil survei dalam Saraswati dan Nugroho (2021) bahwa instrumen tabungan adalah perencanaan keuangan jangka pendek yang masih mendominasi masyarakat Indonesia. Sedangkan Krishna dkk (2010) menjelaskan bahwa literasi keuangan mahasiswa UPI masih jauh dari optimum bahkan mendekati kategori rendah terutama berkenaan dengan pengetahuan investasi, kredit, dan asuransi. Lebih lanjut menurut Saraswati dan

Nugroho (2021) bahwa generasi muda dalam tujuan keuangan individu masih berorientasi pemenuhan kebutuhan saat ini seperti untuk *traveling* atau jangka pendek dan belum memikirkan untuk tujuan jangka panjang.

Beragam fenomena literasi keuangan masyarakat yang ada tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menarik minat dari para investor khususnya investor generasi muda agar mau dan bersedia berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur oleh pemerintah melalui pembelian surat berharga negara ritel sebagai wujud bela negara. Untuk itu menjadi penting mengetahui sejauhmana investasi generasi muda dalam surat berharga negara ritel sebagai wujud bela negara.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan pada ketersediaan literatur utamanya berasal dari artikel-artikel yang relevan dan dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah dan buku tentang bela negara, literasi keuangan, generasi muda dan surat berharga negara. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai tuntunan dalam mengkaji adanya suatu masalah penelitian atau *review of research*. Dengan demikian semakin banyak seorang peneliti mengetahui dan memahami adanya konsep dan teori melalui topik penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya maka diharapkan semakin bisa dipertanggungjawabkan cara dalam meneliti permasalahan yang dihadapi. Menurut Widi dalam Mulyadi (2012) manfaat kajian pustaka dapat menuntun peneliti bergerak menuju arah dan pembentukan teoritis, kemudian mengklarifikasi ide penelitian yang akan dilakukan, dan selanjutnya dapat membantu mengembangkan metodologi."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep bela negara, sikap mental dan karakter bela negara

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela

negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Namun dalam perkembangannya konsep bela negara menjadi lebih lengkap, utuh, dan visioner sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, dimana pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, maupun ancaman hibrida baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang berimplikasi terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman dimaksud dapat berwujud agresi, komunisme, terorisme, separatisme, bencana alam, pemberontakan bersenjata, kerusakan lingkungan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, serangan siber, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan biologi, serangan kimia, serangan nuklir, atau wujud ancaman lainnya yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Mengingat kompleksitas dari ancaman yang ditimbulkan, maka penting untuk disadarkan dan

dibangun sikap mental dan karakter bela negara bagi setiap warga negara sehingga nantinya memiliki daya tangkal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk itu dalam rangka membangun sikap mental dan karakter bela negara maka menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara perlu dilaksanakan pembinaan kesadaran bela negara untuk seluruh warga negara Indonesia. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dimaksudkan untuk membangun dan membentuk sikap mental dan karakter warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran Bela Negara, yaitu warga negara yang memiliki kecintaan kepada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara sebagai nilai dasar bela negara.

Urgensi penanaman nilai dasar bela negara bagi generasi muda

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dalam pasal 7 ayat 3 bahwa Nilai Dasar Bela Negara meliputi cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kemampuan awal bela negara. Keutamaan nilai dasar bela negara tersebut penting untuk ditanamkan pada warga negara Indonesia khususnya generasi muda yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing untuk membentengi diri dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Menurut Nurmalisa (2017) penting membekali generasi muda dalam wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan masa depan dengan 3 (tiga) hal yaitu 1) mengarahkan daya dan kemampuan untuk membudayakan peningkatan kesadaran bela negara disegala aspek kehidupan masyarakat dalam upaya memperkuat persatuan kesatuan bangsa; 2) generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang bertanggung jawab terhadap kesinambungan kepemimpinan bangsa di masa mendatang, memandang perlu untuk menyatukan tenaga dan pemikiran, dalam rangka berperan aktif mengisi

kemerdekaan dalam bingkai kepentingan utama bangsa dan negara; dan 3) menyadari sepenuhnya panggilan tanggung jawab dan peran serta sebagai warga negara (generasi muda) yang menjadi salah satu faktor penggerak dan penentu dalam proses percepatan reformasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Generasi muda diharapkan memiliki sikap mental dan perilaku yang memiliki kesadaran dan kesanggupan dalam mengaktualisasikan nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari mereka di lingkup pendidikan, lingkup pekerjaan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dapat diandalkan untuk menjadi generasi muda harapan bangsa.

Khusus pada aspek pendidikan, paradigma bela negara diletakkan dalam dua pengertian yaitu bela negara secara fisik dan nonfisik. Bela negara secara fisik seperti menghadapi serangan musuh atau agresi militer dengan cara angkat senjata. Sedangkan bela negara secara nonfisik diartikan segala sesuatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta turut berperan serta secara aktif memajukan bangsa dan negara. Sebagai contoh kesadaran sebagai warga negara memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sebagai bagian pendapatan negara yang dipergunakan untuk belanja negara. Menurut Paradigma bela negara pada era pasca reformasi khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan mengarahkan peserta didik untuk taat dan patuh pada negara dengan loyalitas yang ditunjukkan pada peran serta aktif sebagai warga negara. Hal ini sebagai titik pijak baru dalam paradigma bela negara dari militeristik menjadi non militeristik dengan pendekatan keterlibatan aktif warga negara (*civic engagement*) khususnya generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai aktivitas program dan kegiatan dalam rangka memajukan pembangunan bangsa dan negara (Hastangka dan Farid, 2020). Dalam konteks penanaman nilai dasar bela negara ini penting untuk mengetahui literasi keuangan dan keterlibatan generasi muda dalam berinvestasi melalui surat berharga negara ritel sebagai wujud bela negara.

Literasi keuangan generasi muda dan Surat Berharga Negara Ritel

Munculnya kekhawatiran pemerintah terhadap 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya roda APBN dan ketahanan negara dalam perekonomian patut untuk diantisipasi dengan baik. *Pertama*, literasi keuangan generasi muda yang dari hasil beberapa penelitian sebelumnya dinyatakan masih rendah. *Kedua*, surat berharga negara ritel sebagai opsi pemerintah untuk memperkuat basis investor domestik dan wujud bela negara dalam memperkuat ketahanan perekonomian bangsa dan negara.

Investasi Generasi Muda Dalam Surat Berharga Negara Ritel

Sub bahasan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu konseptual yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat berharga negara ritel dan realisasi investasi generasi muda dalam kepemilikan surat berharga negara ritel.

a. Konseptual

Kondisi saling ketergantungan antar negara dan membentuk proses kerjasama dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor riil maupun sektor keuangan tidak terelakkan dalam perekonomian global saat ini. Sebagai komponen penting menghadapi globalisasi ekonomi yang diperlukan oleh banyak negara adalah investasi, mengingat investasi selain sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi juga untuk pembangunan infrastruktur, serta sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Kebijakan pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur sebagai bagian strategi APBN untuk menggerakkan perekonomian sudah tepat dan sesuai dengan semangat pembangunan nasional khususnya RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini mendorong masuknya pemodal asing ke Indonesia untuk berinvestasi baik melalui investasi langsung maupun portofolio. Manfaat adanya investasi langsung dari pemodal asing dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di sekitar lokasi tempat investasi langsung berada. Sedangkan manfaat investasi portofolio (sebagai investasi tidak langsung) dari investor asing dapat menambal kekurangan kebutuhan pendanaan infrastruktur melalui pembelian surat berharga negara (SBN) oleh investor asing. Semakin banyak peminat dan

pembeli SBN (sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran) maka semakin baik kemampuan pemerintah untuk menutup defisit APBN dalam rangka memenuhi kebutuhan berbagai program pembangunan. Namun investasi portofolio oleh pemodal asing umumnya rentan pembalikan modal asing mengingat surat berharga negara dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Adanya peluang investasi yang lebih menguntungkan bagi pemodal asing di tempat lain maka menyebabkan mereka (pemodal asing) segera melepas atau menjual surat berharga yang dimilikinya. Aksi jual yang secara masif dilakukan oleh pemodal asing dapat menurunkan harga surat berharga negara yang kemudian berdampak terhadap kredibilitas pemerintah dan dapat menjarak ke berbagai indikator stabilitas ekonomi negara lainnya.

Kekhawatiran terjadinya pembalikan modal timbul saat mayoritas kepemilikan SBN dari pemodal asing yang dapat menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dan untuk menjaga keberlangsungan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur, perlu digiatkan pendalaman dan inklusi pasar keuangan domestik sebagai perwujudan bela negara khususnya kontribusi generasi muda dalam pembangunan nasional melalui pembelian surat berharga negara (SBN) ritel oleh investor perorangan di Indonesia. Investor ritel khususnya generasi muda sebagai target yang dibidik mengingat populasi generasi muda semakin bertambah proporsinya dan karakter investor ritel Indonesia umumnya *buy and hold*, yang berbeda dari perilaku investor asing dan investor korporasi domestik yang cenderung *profit oriented*. Namun investor domestik dalam kepemilikan surat berharga negara ritel akan memperoleh pengembalian tetap (*fixed rate*) berupa tingkat kupon yang tidak berubah sampai jatuh tempo disamping memiliki kebanggaan sebagai perwujudan bela negara dan cinta tanah air telah berinvestasi dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Disamping itu pemerintah bermaksud menawarkan keuntungan investasi yang dapat dirasakan oleh investor lokal (warga negara Indonesia) melalui pembelian SBN ritel. Selanjutnya dengan semakin luasnya basis investor domestik dapat menyebabkan semakin rendah kepemilikan surat berharga negara oleh investor asing yang berikutnya akan menurunkan risiko

volatilitas harga surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah.

b. Realisasi

Ketertarikan generasi muda dalam berinvestasi sebenarnya tidak hanya pada instrumen konvensional sebagaimana masyarakat umumnya. Minat generasi muda dalam penggunaan produk investasi yang memberikan kemudahan, menjadi alternatif pilihan disamping faktor keamanan produk investasi seperti dalam surat berharga negara ritel yang bebas gagal bayar karena telah dijamin undang-undang. Faktor kemudahan dan praktis dalam pemesanan surat berharga negara ritel secara online dengan nilai minimal Rp1juta sudah dapat dilayani dan cukup dilakukan transaksi tersebut untuk diselesaikan melalui media gadget dimana generasi muda sangat familiar dan tidak mengalami kendala dalam penggunaannya. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi generasi muda memulai untuk belajar dan berinvestasi dalam surat berharga negara yang ditawarkan oleh pemerintah mengingat nilai nominal Rp1juta dirasa tidak memberatkan untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan surat berharga negara ritel tersebut.

Data dari Bank Indonesia bahwa kenaikan investor dari tahun ke tahun (yoy) menunjukkan tren yang positif, dimana jumlah investor ritel pada bulan Juni tahun 2022 sebesar 9,1 juta meningkat pesat dari jumlah investor ritel sebanyak 2,5 juta pada akhir bulan Desember tahun 2019. Namun demikian, besaran jumlah tersebut masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah investor di negara lain dan masih besarnya potensi pasar keuangan di Indonesia (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/new-s-release/Pages/sp_2421422.aspx, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022).

Pemerintah bersama otoritas di pasar keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap instrumen dan industri keuangan di antaranya melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, diseminasi, seminar dan lainnya. Termasuk di dalamnya, dengan perluasan dan kemudahan layanan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada generasi muda sebagai investor ritel yang memperoleh manfaat perolehan kesejahteraan di masa depan dan perwujudan bela negara nonfisik di bidang ekonomi dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Instrumen surat berharga negara ritel kedepannya diharapkan

menjadi instrumen utama bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam berinvestasi yang selanjutnya kedepan semakin menguatkan pasar keuangan Indonesia dengan keterlibatan aktif dari investor-investor domestik yang memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik (*well educated*).

KESIMPULAN

Nilai Dasar Bela Negara mencakup cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kemampuan awal bela negara. Keutamaan nilai dasar bela negara tersebut penting untuk ditanamkan pada warga negara Indonesia khususnya generasi muda yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing untuk membentengi diri dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Sumbangsih Bela negara warga negara khususnya generasi muda dalam wujud ketahanan negara bidang perekonomian dengan berinvestasi pada produk investasi berupa surat berharga negara ritel yang ditawarkan oleh pemerintah. Adanya peningkatan generasi muda dalam merencanakan dan membeli surat berharga negara ritel berarti turut serta memperkuat basis investor domestik dan memperkuat ketahanan perekonomian bangsa dan negara dengan menahan atau membatasi kepemilikan pemodal asing terhadap surat berharga negara. Kedepannya surat berharga negara ritel dapat menjadi kepercayaan publik khususnya bagi generasi muda sebagai instrumen utama bela negara nonfisik dalam investasinya yang secara otomatis semakin memperkuat keberadaan pasar keuangan Indonesia dengan dukungan aktif dari investor-investor perorangan domestik dalam rangka mewujudkan pertahanan negara Indonesia dibidang ekonomi .

REFERENCES (at least 15 refereences)

Artina, Nyimas dan Idham Cholid. 2018. Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan). *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Edisi Maret

- Hastangka dan Muhammad Farid. 2020. Paradigma Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Pascareformasi. *Civic-Culture*. Volume 4 Nomor 2.
- Jannah, R., & Wibawani, S. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2).
- Krishna, Ayu dkk. 2010. Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Survey pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia). *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia*.
- Maruapey, M Husein. 2016. Pajak dan Bela Negara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol VI No. 1
- Mulyadi, Mohammad. 2012. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 16 No. 1
- Nurmalisa, Yunisca. 2017. *Pendidikan Generasi Muda*. Media Akademi : Yogyakarta
- Pitaloka, Anis Rosella, and Sri Wibawani. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Karakter Bela Negara Melalui Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9.1 (2019).
- Prayogi, Febrianto Dwi dan Nadia Asandimitra Haryono. 2017. Literasi Keuangan Pada Masyarakat Bangkalan Madura. *Seminar Nasional Riset Inovatif*.
- Saraswati, Ade Maya dan Arif Widodo Nugroho. 2021. Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Generasi Z di Masa Pandemi COVID-19 melalui Penguatan Literasi Keuangan. *Jurnal Warta LPM*. Vol. 24 No. 2.
- Suryatni, Luh. 2019. Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 10 No. 1
- Wahyono, SK. 1996. Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal*

Ketahanan Nasional. Program Studi
Ketahanan Nasional SPs UGM, Yogyakarta.

Yushita, Amanita Novi. 2017. Pentingnya Literasi
Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan
Pribadi. *Jurnal Nominal*. Volume VI Nomor
1

(Peraturan)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945

Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk
Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela
Negara

Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Kinerja
Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri Triwulan I Tahun 2021

(Web)

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/news
-release/Pages/sp_2421422.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/news-release/Pages/sp_2421422.aspx)

